

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pembangunan berkelanjutan adalah suatu isu yang sudah lama diperkenalkan dunia. Istilah pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dipopulerkan pada tahun 1987 oleh the World Commission on Environment and Development (WCED) yaitu *development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (Ngoyo, 2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga landasan inti diantaranya yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan hidup dimana antara satu dan lainnya harus mempunyai porsi yang sama dan seimbang, tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi seperti model pembangunan konvensional (Suparmoko, 2020). Menurut Munasinghe (2009) aspek ekonomi yang terdiri dari pertumbuhan, efisiensi serta stabilitas. Aspek sosial yang terdiri dari pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Aspek lingkungan yang terdiri dari keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan yang harus dilakukan dengan tetap memikirkan bagaimana efek dan pengaruhnya bagi masyarakat luas.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan sendiri yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan dapat memberikan kesejahteraan tidak hanya untuk saat sekarang tetapi juga untuk masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya dilaksanakan dengan menggabungkan tiga elemen penting pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosil dan lingkungan hidup (Ngoyo, 2015).

Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya bukan merupakan hal yang mudah dicapai serta memerlukan usaha dan komitmen yang luar biasa dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi konsep pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak agar pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Perlunya kontribusi dan kolaborasi yang padu antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, organisasi masyarakat, masyarakat, serta generasi muda sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak (Ngoyo, 2015).

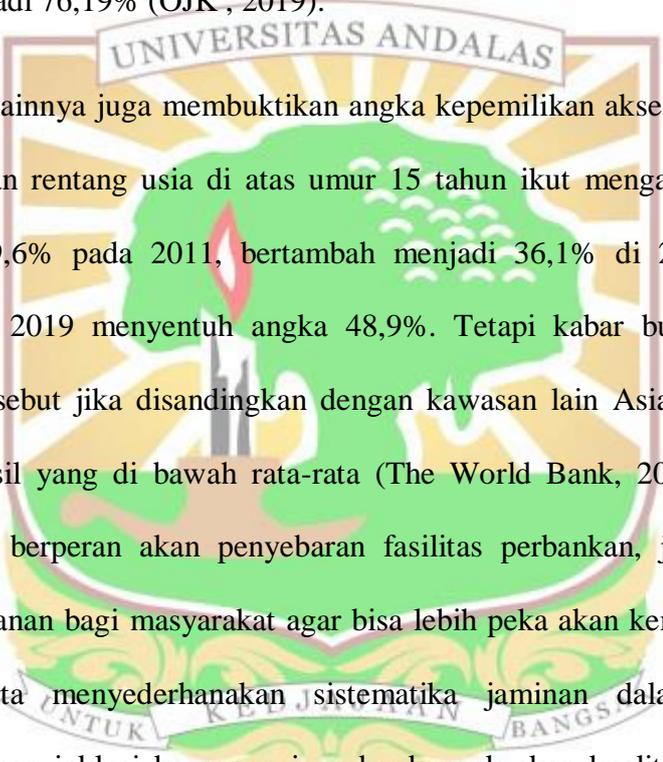
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang beroperasi pada bidang keuangan juga mulai ikut berpartisipasi dalam menggalakkan konsep keberlanjutan pada operasional bisnisnya. Konsep pembangunan berkelanjutan diimplementasikan oleh lembaga perbankan dalam bentuk keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan sendiri dijelaskan sebagai dukungan secara keseluruhan dari lembaga keuangan pada pertumbuhan berkelanjutan yang didapatkan dari hasil keseimbangan antara keselarasan sosial, ekonomi, dan lingkungan (OJK, 2014).

Dalam mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan, bank secara perlahan-lahan harus menerapkan dan menanamkan pilar-pilar keberlanjutan ke dalam setiap bentuk rencana, tujuan, visi, misi, serta prospek bank tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya organisasi yang menaungi ide keberlanjutan dengan nama Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) yang merupakan suatu bentuk implementasi nyata dari lembaga perbankan dalam mendukung keuangan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). IKBI pada awal terbentuk terdiri dari delapan bank yaitunya enam buah bank konvensional dan dua buah bank syariah yang tergabung sebagai *first movers* dalam penerapan *sustainable banking* diantaranya yaitu BRI, BRI Syariah, BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank Artha Graha serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Menurut Abubakar & Tri Handayani (2019), dengan dimulainya penerapan keuangan berkelanjutan, pada era seperti sekarang banyak bermunculan inovasi dan layanan yang lebih baik kepada klien untuk memastikan profitabilitas yang lebih tinggi. Perbankan juga sudah mengenalkan beberapa produk & layanan berkelanjutan yang berdasarkan pada pilar pembangunan berkelanjutan seperti *Financial Inclusion* dalam aspek ekonomi, *Corporate Social Responsibility* dalam aspek sosial, dan *Green Banking* dalam aspek lingkungan.

Dari aspek ekonomi, Bank Indonesia (2014) menggambarkan inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) seperti keseluruhan usaha untuk memperluas kesempatan masyarakat akan pelayanan lembaga perbankan dan senantiasa

menghapuskan kendala-kendala dalam berbagai macam bentuk. Semenjak diluncurkannya program literasi keuangan yang dimulai tahun 2011, pengetahuan masyarakat umum mengenai produk perbankan mengalami lonjakan yang cukup tajam. Terlihat nyata pada peninjauan yang dilakukan OJK dimana pengetahuan keuangan masyarakat pada awalnya berada pada 29,7% bertambah menjadi 38,03%. Sedangkan inklusi keuangan yang mulanya berada pada titik 67,8% melonjak menjadi 76,19% (OJK , 2019).



Survei lainnya juga membuktikan angka kepemilikan akses akan lembaga finansial dengan rentang usia di atas umur 15 tahun ikut mengalami kenaikan. Dari angka 19,6% pada 2011, bertambah menjadi 36,1% di 2014 dan pada akhirnya pada 2019 menyentuh angka 48,9%. Tetapi kabar buruknya adalah pencapaian tersebut jika disandingkan dengan kawasan lain Asia Pasifik masih menduduki hasil yang di bawah rata-rata (The World Bank, 2018). Keuangan inklusif selain berperan akan penyebaran fasilitas perbankan, juga senantiasa memegang peranan bagi masyarakat agar bisa lebih peka akan kemajuan fasilitas perbankan serta menyederhanakan sistematisa jaminan dalam melakukan pinjaman. Konsep inklusi keuangan juga berdampak akan kualitas pengetahuan akan keuangan serta efek-efek lainnya yang tidak lepas dari hubungan antar satu sama lain dan bersama-sama mencapai tujuan yang diimpikan (Kafabih, 2020).

Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut The World Business Council dalam pengembangan keberlanjutan menggambarkan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dengan misi meningkatkan kualitas kehidupan (Ardani & Luh, 2020).

Pada penyelenggaraan CSR di Indonesia terdapat berbagai fenomena negatif yang terjadi seperti permasalahan antara PT. Freeport Indonesia dengan penduduk setempat mengenai pelanggaran aturan daerah setempat, tanah masyarakat, serta ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu fenomena yang terjadi pada PT. Newmount Minahasa Raya dimana perusahaan tersebut melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang tailing ke dasar laut yang mengakibatkan kasus ini tidak hanya berskala nasional tetapi sampai internasional. Kasus hampir sama dialami PT. Caltex Pacific Indonesia yang melakukan polusi lingkungan dan sosial dalam pelaksanaannya yang berlokasi di Duri, Riau membuat kasus ini diteruskan ke tingkat DPR. Dengan berbagai fenomena di atas bisa kita simpulkan bahwa permasalahan pada pelaksanaan CSR ini adalah beberapa perusahaan cenderung menggunakan CSR hanya sebatas program yang meningkatkan nilai mereka di mata masyarakat saja, sedangkan dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik (Ratnaningsih, 2015).

Dari sisi lingkungan, perbankan hijau seperti yang dikutip dari Rajput dan Khanna (2013) dipandang sebagai sistemika perbankan yang pada pelaksanaannya dilandaskan oleh azas-azas keberlanjutan. Bagian yang paling disoroti pada konten ini adalah bagian kredit ataupun pendanaan dimana terdapat

keselarasan lingkungan, kesetaraan antar manusia, serta kesejahteraan masyarakat sosial dan budaya.

Tanpa disadari atau tidak beberapa kegiatan perbankan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti pemberian pembiayaan kepada kegiatan ekonomi yang dimana dari segi ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang bersamaan dapat menurunkan fungsi lingkungan. Contohnya ketergantungan akan sumber daya yang tidak bisa diperbarui untuk sumber energi di dalam negeri. Pemakaian BBM yang didominasi untuk kepentingan transportasi dan industri dalam negeri yang bergantung pada BBM dan batu bara (Responsi Bank Indonesia, 2014).

Dari fenomena tersebut muncul inisiatif perbankan di Indonesia untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan, seperti Bank Mandiri yang memberikan bantuan senilai 41,3 juta dollar ke beberapa wilayah untuk membangun pembangkit listrik dengan energi biogas yang pada akhirnya dapat menurunkan emisi CO₂. Selain itu BRI juga ikut menyalurkan kredit senilai 127 miliar rupiah untuk pengelolaan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Jawa Tengah dan Jawa Timur di tahun 2012. Tak hanya itu, berbagai bank di Indonesia juga ikut serta memberikan kredit terutama untuk petani atau peternak yang menjamin pengadaan pangan dan energi nabati serta dikelola menjadi biogas dan biotanol (Responsi Bank Indonesia, 2014)

Dari kondisi aspek-aspek keuangan berkelanjutan seperti yang sudah dijabarkan di atas, penulis merasa perlu dalam mengkaji dan menganalisis

bagaimana bank konvensional sebagai salah satu penggerak pertama keuangan berkelanjutan di negeri kita menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan pada lembaga perbankan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip atau pilar pembangunan berkelanjutan yaitunya aspek ekonomi yang diimplementasikan dalam Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*), aspek sosial yang diimplementasikan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan aspek lingkungan yang diimplementasikan dalam *Green Banking*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia?
2. Bagaimana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi *Green Banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia.

2. Untuk menganalisis kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kontribusi *Green Banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional di Indonesia.

